

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

*Accounting Information System* (AIS) awalnya difokuskan pada pencatatan, peringkasan validasi data tentang transaksi keuangan bisnis. Sistem akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan dengan bantuan komputer. Oleh karena itu, peningkatan teknologi informasi telah memfasilitasi penggunaan prosedur akuntansi biaya dan manajemen. Perkembangan Teknologi Informasi telah menjadi hal terpenting dalam dekade terakhir dan telah memimpin perkembangan dalam globalisasi pasar dan masyarakat (Salehi, 2010).

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah pada era reformasi perkembangan akuntansi sektor publik kini berkembang pesat khususnya di Indonesia. Penekanan pada otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menitik beratkan pada pemerintah. Akuntansi sektor publik adalah satu pertanggungjawaban kepada publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik dengan menggunakan sistem akuntansi. Melalui kebijakan otonomi daerah kebijakan pemerintahan pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan laporan keuangan. Dalam organisasi sektor publik, masih banyak terdapat fenomena laporan keuangan pemerintah yang tidak memberikan informasi sesuai dengan peraturan, dan pada saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan

pemeriksaan laporan keuangan dan audit, masih sering ditemukan penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan. Akibatnya hal tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tata pemerintahan yang baik (*good goverance*). Tata kelola pemerintahan yang baik biasanya mengacu pada tata kelola pemerintahan dengan melaksanakan pengelolaan pembangunan yang bertanggungjawab dan mematuhi prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari alokasi dana investasi yang tidak tepat, mencegah korupsi dalam politik dan administrasi, dan menerapkan disiplin anggaran.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, pasal 32 mengatur bahwa Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (APD). Laporan keuangan pemerintahan merupakan hak publik yang harus diberi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mardioso (2010), aksesibilitas laporan keuangan yang akan diberikan kepada publik dan pihak lainnya memiliki kepentingan dengan laporan keuangan daerah memungkinkan adanya pengawasan dan umpan balik yang lebih fleksibel mengenai kemudahan akses, dan dapat digunakan untuk koreksi atau implementasi tata kelola yang baik bagi pemerintah daerah. Aksesibilitas tersebut dapat diberikan melalui media seperti koran, majalah, radio, stasiun televisi dan website. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses pembangunan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

*governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, dan menyajikan informasi keuangan daerah kepada publik.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dasar pelaporan keuangan pemerintah dan merupakan tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintah. Prinsip transparansi artinya seluruh instansi pemerintahan harus terbuka kepada publik dalam hal pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan maupun yang berkaitan dengan suatu keputusan perlu memiliki akses untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Sedangkan prinsip akuntabilitas merupakan pelaksanaan setiap tugas, penggunaan sumber daya dan penggunaan kewenangan harus ditinjau oleh lembaga independen.

Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan kepala daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan meminta kepada kepala SKPD untuk membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang telah dilaksanakan. Bentuk pertanggungjawaban ini bukan dalam bentuk surat pertanggungjawaban, melainkan dalam bentuk laporan keuangan.

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 3.2. tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.1 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintahan Daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan

pengelolaan keuangan sendiri. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijadikan sebagai pedoman dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, cepat dan tentunya data yang dihasilkan lebih akurat.

Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) merupakan Sistem Informasi Akuntansi aplikasi komputerisasi yang dibentuk oleh pemerintahan Kabupaten Sleman yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan secara terkomputerisasi, sistem informasi yang dibuat diharapkan mampu mempermudah penyusunan laporan keuangan dan mampu memberi manfaat bagi pemerintah agar mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan suatu penerapan yang sistematis, mulai dari pengelompokkan, pengklasifikasian, pencatatan dan pengolahan kegiatan keuangan pemerintah daerah hingga laporan keuangan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Nanda Saputri Yanti (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penelitian ini juga didukung Dini Ariani Putri (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, penelitian ini dilakukan juga

oleh Rina Erlanda (2016) yang meneliti tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi, dan penelitian ini juga dilakukan oleh Gerryan Putra (2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, sedangkan akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksanaan dan pelaporan merupakan faktor penyebab belum maksimalnya sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi keuangan daerah kurang baik dan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang tidak maksimal. Dalam penelitian ini sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang muncul tergolong dalam kategori cukup baik, namun hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut masih memiliki kekurangan dan kelemahan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi, dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman”.

## **1.2. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman?
3. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah mampu memberi pengaruh positif terhadap laporan keuangan sehingga mengurangi terjadinya manipulasi dalam pelaporan keuangan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang sistem informasi akuntansi keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

### b. Bagi Pihak Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan pengetahuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

### **1.5. Batasan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek penelitian hanya Kabupaten Sleman.
- b. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam mengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah hanya menggunakan 2 prinsip yaitu transparansi dan akuntabilitas.
- c. Proses pengambilan data hanya menggunakan metode penyebaran kuisisioner.

### **1.6. Kerangka Penulisan**

Kerangka penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan kerangka sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini merupakan bagian yang membahas latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisa penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran adalah permasalahan yang akan diteliti dan pengembangan hipotesis adalah dugaan yang disimpulkan dari landasan teori penelitian terdahulu.

### BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan penelitian dilakukan secara operasional. Pada bagian ini diuraikan tentang metode penelitian berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan instrument penelitian yang digunakan. Kemudian metode analisa data memuat penjelasan mengenai cara dan langkah-langkah sistematis pengelolaan data. Selain itu menjelaskan alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisa data dan pembahasan hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

### BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penutup merupakan bagian terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan berisi penyajian secara singkat dari hasil pembahasan, saran dan keterbatasan penelitian.